

# Pemanfaatan Sistem E-Budgeting dalam Mitigasi Dampak Inflasi Pada APBD (Pemerintah Kota Medan)

## *The Utilization of the E-Budgeting System in Mitigating the Impact of Inflation on the Regional Budget (Medan City Government)*

Wardhani Indah Sari<sup>1)</sup>, Aditya Fariski<sup>2)</sup>, Imam Syahroji Az-zahri<sup>2)</sup>,  
M.Aziiz Sukani<sup>2)</sup>, Warsani Purnama Sari<sup>2)</sup>\* & Ahmad Prayudi<sup>3)</sup>

1) Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Indonesia

2) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Indonesia

3) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 05 Juli 2025; Direview: 31 Juli 2025; Disetujui: 18 Agustus 2025

\*Corresponding Email: [warsani@staff.uma.ac.id](mailto:warsani@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Inflasi merupakan salah satu tantangan dari perekonomian yang berdampak signifikan terhadap pengelolaan APBD, termasuk di Kota Medan. Pelemahan daya beli masyarakat serta kemampuan fiskal swasta kerap kali terjadi karena Kenaikan harga barang dan jasa. Dampak tersebut tidak saja mengarah pada akuntansi fiskal daerah, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem e-Budgeting sebagai alat mitigasi dampak inflasi terhadap APBD Kota Medan. Kerangka analisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Budgeting sangat efektif dalam rangka meningkatkan efisiensi perencanaan anggaran, akurasi alokasi dana dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sistem e-Budgeting ini akan memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap program prioritas terdampak inflasi, seperti pengadaan bantuan sosial dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun, implementasinya di Medan telah terkendala oleh ketidakmampuan teknis dan kapasitas aparatur. Oleh sebab itu, studi ini merekomendasikan penguatan integrasi e-Budgeting dengan sistem perencanaan daerah dan peningkatan pelatihan aparatur untuk memaksimalkan peranannya dalam stabilisasi fiskal. Temuan ini memberikan kontribusi pada literatur tata kelola keuangan daerah dan kebijakan adaptif terhadap dinamika ekonomi makro.

**Kata Kunci:** e-Budgeting; inflasi; APBD; Mitigasi; Tata Kelola Keuangan Daerah.

### Abstract

*Inflation is one of the challenges of the economy that has a significant impact on the management of the Regional Budget, including in Medan City. The weakening of people's purchasing power and private fiscal capacity often occurs due to the increase in the price of goods and services. This impact not only leads to regional fiscal accounting, but also to infrastructure development and public services. This study aims to analyze the role of the e-Budgeting system as a tool to mitigate the impact of inflation on the Medan City Regional Budget. The analysis framework uses a quantitative approach with literature study techniques and policy analysis. The results of the study show that e-Budgeting is very effective in increasing the efficiency of budget planning, the accuracy of fund allocation and transparency of regional financial management. This e-Budgeting system will allow the government to make adjustments to priority programs affected by inflation, such as the provision of social assistance and the implementation of infrastructure development. However, its implementation in Medan has been hampered by technical incompetence and the capacity of the apparatus. Therefore, this study recommends strengthening the integration of e-Budgeting with the regional planning system and increasing training for the apparatus to maximize its role in fiscal stabilization. These findings contribute to the literature on regional financial governance and adaptive policies to macroeconomic dynamics.*

**Keywords:** e-Budgeting; inflation; APBD; Mitigation; Regional Financial Governance.

**How to Cite:** Sari, W.I., Fariski, A., Az-zahri, I.S., Sukani, M.A., Sari, W.P., & Prayudi, A. (2025), Pemanfaatan Sistem E-Budgeting dalam Mitigasi Dampak Inflasi Pada APBD (Pemerintah Kota Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (1): 493-500.

## **PENDAHULUAN**

Kenaikan inflasi menimbulkan tantangan multidimensi bagi pengelolaan APBD karena (i) menekan daya beli masyarakat, (ii) menggerus daya beli belanja pemerintah (real purchasing power), dan (iii) menciptakan mismatch antara proyeksi pendapatan–belanja dalam siklus anggaran yang relatif kaku. Literatur fiskal menunjukkan inflasi biasanya memperbesar basis pajak secara nominal, tetapi pada saat yang sama mendorong biaya belanja—khususnya pos yang terindeks/tersesuaikan (upah, bantuan sosial, bahan bangunan)—serta menurunkan akurasi proyeksi dan efektivitas program (Garcia-Macia, 2023; IMF, 2023; OECD, 2022). Di tingkat daerah, gejolak harga pangan/energi membuat realisasi biaya proyek infrastruktur dan intervensi sosial sering meleset dari rencana awal.

Di Medan, inflasi sempat relatif rendah pada 2024–2025 (mis. y-on-y 2,12% di Desember 2024; 0,64% di Mei 2025), namun tetap berfluktuasi antarbulan dan antar-komoditas sehingga menuntut respons anggaran yang gesit (BPS Kota Medan, 2025a, 2025b). Pada saat yang sama, struktur APBD Kota Medan 2024 menekankan infrastruktur dan program prioritas, termasuk penyesuaian pada Perubahan APBD (P-APBD) yang tetap diminta memprioritaskan infrastruktur esensial (Antara, 2024; Antara, 2025; Perwal Medan No. 97/2023). Secara nasional, Kemendagri mewajibkan penggunaan SIPD RI (e-Budgeting terintegrasi) untuk memperkuat konsistensi proses, alur data, standar harga, dan pengendalian (Kemendagri–Keuda, 2024; SIPD RI, t.t.).

Inflasi telah menjadi fenomena ekonomi yang berdampak sistemik pada pengelolaan fiskal daerah. Amalia dan Nugroho (2022) menegaskan bahwa tekanan inflasi menimbulkan konsekuensi pada daya beli masyarakat sekaligus menurunkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Di Kota Medan, misalnya, tren inflasi yang mencapai 5,2% pada tahun 2023 (BPS, 2023) telah menimbulkan efek domino berupa penurunan daya beli masyarakat sebesar 8,7% serta penyusutan kapasitas fiskal pemerintah daerah (Bank Indonesia, 2023).

Menurut teori Keynes (1936) yang kemudian dikembangkan oleh Oates (1972) dalam analisis fiskal daerah, inflasi menciptakan distorsi dalam alokasi anggaran melalui mekanisme money illusion. Hal ini tampak di Medan, ketika proyek infrastruktur mengalami under-spending hingga 15% akibat kenaikan harga material konstruksi (Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, 2023). Situasi tersebut diperparah oleh rigiditas sistem penganggaran konvensional yang kurang responsif terhadap dinamika ekonomi (Basri, 2021).

Sebagai respon, konsep e-Budgeting muncul sebagai solusi digital. Caba (2008) memperkenalkan kerangka ini sebagai bagian dari reformasi e-government, yang kemudian diadaptasi di Indonesia melalui berbagai inisiatif, termasuk oleh Indonesian Budget Center (2021). Penelitian empiris menunjukkan efektivitasnya: Susanto dkk. (2022), berdasarkan studi di 15 kota besar Indonesia, menemukan bahwa implementasi e-Budgeting mampu meningkatkan fleksibilitas anggaran hingga 25% serta mengurangi waktu revisi APBD dari rata-rata tiga bulan menjadi dua minggu ketika terjadi gejolak inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem digital dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan resiliensi fiskal daerah di tengah ketidakpastian ekonomi.

Namun, studi terbaru oleh Siregar dan Fahmi (2023) menunjukkan bahwa di Kota Medan adopsi e-Budgeting masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Pertama, sekitar 42% aparatur daerah belum memiliki keterampilan memadai dalam mengoperasikan sistem digital. Kedua, terdapat integrasi yang lemah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, e-Budgeting belum dilengkapi dengan fitur prediktif yang dapat mengantisipasi fluktuasi inflasi dan dinamika ekonomi daerah. Keterbatasan ini sejalan dengan kritik Moon (2021) yang menyoroti adanya digital gap dalam implementasi e-government di negara berkembang, sehingga meskipun digitalisasi telah diadopsi secara formal, manfaat optimalnya belum sepenuhnya dirasakan.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas e-Budgeting sebagai shock absorber fiskal dalam menghadapi tekanan inflasi di tingkat daerah. Pendekatan yang digunakan mengadaptasi kerangka digital fiscal resilience yang dikembangkan oleh Davoodi (2022), dengan menekankan pentingnya responsivitas sistem keuangan publik terhadap guncangan makroekonomi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi



kekosongan literatur baik secara geografis—melalui studi kasus di Medan—maupun metodologis, yakni dengan merancang indikator baru untuk mengukur responsivitas sistem anggaran digital terhadap inflasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi reformasi fiskal daerah serta memperluas kerangka teoritis tentang peran digitalisasi dalam pengelolaan keuangan publik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka dan analisis kebijakan sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran sistematis mengenai keterkaitan antara variabel inflasi, sistem e-Budgeting, dan pengelolaan APBD Kota Medan. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas sistem e-Budgeting dalam memitigasi dampak inflasi, sekaligus menganalisis sejauh mana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi perencanaan anggaran, akurasi alokasi dana, serta transparansi keuangan daerah (Amalia & Nugroho, 2022; Susanto, Putri, & Wijaya, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi dan publikasi ilmiah, antara lain: laporan inflasi dan indikator makroekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia, dokumen APBD Kota Medan (Pemerintah Kota Medan, 2023), serta laporan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Selain itu, penelitian juga merujuk pada publikasi Indonesian Budget Center (2021) mengenai implementasi e-Budgeting di berbagai kota di Indonesia sebagai bahan perbandingan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan fiskal digital yang diadaptasi dari konsep Digital Fiscal Resilience oleh Davoodi (2022). Kerangka ini menekankan kemampuan sistem keuangan daerah berbasis digital untuk menyerap guncangan ekonomi, seperti inflasi, melalui proses adaptasi yang cepat, transparan, dan berbasis data. Setiap indikator dianalisis dengan menitikberatkan pada:

1. Efektivitas sistem e-Budgeting dalam menyesuaikan belanja prioritas.
2. Efisiensi proses revisi anggaran pada masa inflasi tinggi.
3. Tingkat partisipasi publik dalam pengawasan APBD.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi e-Budgeting, sebagaimana ditunjukkan oleh Siregar dan Fahmi (2023) bahwa rendahnya keterampilan aparatur serta keterbatasan integrasi sistem masih menjadi hambatan utama. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menilai performa teknis e-Budgeting dalam konteks fiskal, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan responsivitas dan resiliensi fiskal pemerintah daerah terhadap dinamika ekonomi makro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran sistem e-Budgeting sebagai instrumen mitigasi dampak inflasi terhadap APBD Kota Medan

Inflasi merupakan salah satu faktor makroekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan fiskal daerah, termasuk Kota Medan. Kenaikan harga barang dan jasa tidak hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi juga memengaruhi struktur belanja pemerintah daerah melalui pembengkakan biaya program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan bantuan sosial (Bank Indonesia, 2023). Dalam konteks ini, hadirnya sistem e-Budgeting menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ketahanan fiskal daerah dengan cara meminimalisasi inefisiensi, memperbaiki akurasi alokasi anggaran, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan APBD.

Sistem e-Budgeting memungkinkan proses perencanaan dan revisi anggaran dilakukan lebih cepat, responsif, dan terukur dibandingkan metode manual. Penelitian Susanto et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan e-Budgeting di 15 kota di Indonesia mampu memangkas waktu revisi APBD dari rata-rata tiga bulan menjadi hanya dua minggu. Efisiensi ini berimplikasi positif dalam situasi inflasi, karena pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan belanja prioritas,

misalnya dengan mengalihkan sebagian dana ke program perlindungan sosial tanpa menunggu proses birokrasi panjang.

Selain efisiensi, sistem ini juga meningkatkan akurasi alokasi dana. Data keuangan yang terintegrasi secara digital memungkinkan identifikasi sektor yang paling terdampak inflasi, sehingga pemerintah dapat menetapkan skala prioritas yang lebih rasional (Indonesian Budget Center, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep digital fiscal resilience yang dikemukakan Davoodi (2022), yaitu kemampuan sistem fiskal berbasis digital dalam menyerap guncangan ekonomi melalui adaptasi cepat dan berbasis data.

Namun demikian, implementasi e-Budgeting di Kota Medan belum sepenuhnya optimal. Studi Siregar dan Fahmi (2023) mengungkapkan adanya tiga hambatan utama, yaitu: (1) 42% aparatur belum terampil dalam menggunakan sistem digital, (2) lemahnya integrasi e-Budgeting dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan (3) keterbatasan fitur prediktif untuk mengantisipasi fluktuasi inflasi. Hambatan ini membatasi kapasitas adaptif e-Budgeting sebagai instrumen mitigasi fiskal.

Oleh karena itu, peran e-Budgeting dalam menghadapi inflasi tidak hanya bergantung pada desain sistem, tetapi juga pada faktor kelembagaan dan sumber daya manusia. Penguatan integrasi antar-sistem, pengembangan fitur prediktif berbasis big data, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk memaksimalkan peran e-Budgeting sebagai shock absorber fiskal. Dengan demikian, studi tentang Kota Medan tidak hanya memberikan kontribusi praktis bagi tata kelola keuangan daerah, tetapi juga memperluas literatur tentang adaptasi kebijakan fiskal digital di negara berkembang.

### **Kendala implementasi e-Budgeting di Kota Medan, khususnya terkait kapasitas aparatur dan integrasi sistem.**

Implementasi e-Budgeting di Kota Medan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akurasi dalam perencanaan dan pengelolaan APBD. Namun, sejumlah kendala masih membatasi efektivitasnya, terutama yang berkaitan dengan kapasitas aparatur dan integrasi sistem.

Pertama, kendala terkait kapasitas aparatur menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat optimalisasi sistem. Menurut Siregar dan Fahmi (2023), sekitar 42% aparatur di Kota Medan belum memiliki keterampilan memadai dalam mengoperasikan aplikasi e-Budgeting secara efektif. Rendahnya literasi digital ini berimplikasi pada kesalahan input data, keterlambatan pengolahan informasi, serta minimnya pemanfaatan fitur analitik yang disediakan sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam tata kelola fiskal tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat lunak, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia untuk menggunakannya. Pelatihan berkelanjutan dan penguatan kapasitas teknis aparatur menjadi kebutuhan mendesak agar sistem dapat dioperasikan secara konsisten dan akurat (Susanto, Wijaya, & Putri, 2022).

Kedua, hambatan lain terletak pada integrasi sistem e-Budgeting dengan platform tata kelola keuangan daerah lainnya, khususnya dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian Siregar dan Fahmi (2023) menyoroti lemahnya interoperabilitas antara e-Budgeting dan SIPD, yang menyebabkan tumpang tindih data, keterlambatan sinkronisasi, serta potensi inkonsistensi dalam laporan keuangan. Kondisi ini memperlambat proses penyesuaian anggaran ketika terjadi tekanan eksternal seperti inflasi. Padahal, dalam kerangka digital fiscal resilience yang dikemukakan Davoodi (2022), integrasi antar-sistem merupakan prasyarat penting agar pemerintah daerah dapat melakukan adaptasi fiskal secara cepat dan transparan.

Keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya integrasi sistem pada akhirnya mengurangi efektivitas e-Budgeting sebagai instrumen mitigasi dampak inflasi di Kota Medan. Alih-alih menjadi sarana adaptif, sistem ini masih rentan terhadap kesalahan teknis dan hambatan birokrasi digital. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu diarahkan pada dua aspek utama: (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan intensif dan pendampingan teknis, serta (2) penguatan integrasi sistem melalui pengembangan interoperabilitas antar-platform berbasis standar data terbuka.



Dengan mengatasi kendala tersebut, e-Budgeting diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal yang adaptif, tidak hanya dalam menghadapi inflasi, tetapi juga dalam menanggapi dinamika ekonomi makro lainnya yang memengaruhi stabilitas APBD Kota Medan.

### Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integrasi e-Budgeting dengan sistem perencanaan daerah serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika inflasi

#### 1. Penguatan Integrasi e-Budgeting dengan Sistem Perencanaan Daerah

- **Standarisasi Data dan Interoperabilitas.** Pemerintah Kota Medan perlu mengembangkan standar data terbuka (*open data standards*) untuk memastikan interoperabilitas antara e-Budgeting, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan aplikasi perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini akan mengurangi tumpang tindih data, mempercepat sinkronisasi, serta meningkatkan akurasi laporan fiskal (Davoodi, 2022).
- **Arsitektur Sistem Terpadu.** Diperlukan desain arsitektur sistem keuangan daerah yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi berbasis *real-time dashboard*. Dengan cara ini, pemerintah dapat segera menyesuaikan alokasi anggaran ketika terjadi lonjakan harga akibat inflasi (Moon, 2021).
- **Kolaborasi Multi-Stakeholder.** Integrasi sistem juga harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan penyedia teknologi. Langkah ini dapat mempercepat proses harmonisasi kebijakan digital fiskal serta meminimalisasi fragmentasi birokrasi (Susanto, Wijaya, & Putri, 2022).

#### 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Pelatihan Digital Intensif dan Berkelanjutan.** Diperlukan program pelatihan rutin bagi aparatur, tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada analisis fiskal berbasis data. Pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan prediksi aparatur terhadap dampak inflasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti (Siregar & Fahmi, 2023).
- **Pengembangan Unit Khusus Digital Fiscal Analysis.** Pemerintah Kota Medan dapat membentuk unit khusus yang bertugas melakukan analisis kebijakan fiskal digital. Unit ini berfungsi sebagai *early warning system* untuk mendeteksi risiko inflasi dan menyiapkan skenario penyesuaian anggaran.
- **Insentif Kinerja Berbasis Kompetensi Digital.** Penerapan sistem penghargaan berbasis kinerja digital dapat mendorong aparatur untuk lebih adaptif menggunakan e-Budgeting. Insentif ini akan meningkatkan motivasi dalam menguasai teknologi baru sekaligus memperkuat budaya kerja berbasis digital.

#### 3. Adaptasi Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi

- **Fleksibilitas Anggaran.** Melalui e-Budgeting, pemerintah perlu merancang *contingency budget* yang memungkinkan pergeseran belanja prioritas (misalnya dari proyek infrastruktur ke bantuan sosial) ketika inflasi meningkat.
- **Pemanfaatan Fitur Prediktif.** Penguatan fitur analitik prediktif dalam e-Budgeting dapat membantu memproyeksikan skenario inflasi dan dampaknya terhadap APBD, sehingga pemerintah lebih siap dalam melakukan intervensi fiskal (Davoodi, 2022).

Tabel 1. Indikator Kuantitatif dan Kualitatif Terkait Inflasi, Daya Beli, dan Implementasi e-Budgeting di Kota Medan

No	Variabel	Nilai Kuantitatif	Sumber/Referensi
1	Tingkat inflasi Kota Medan tahun 2023	5,2%	Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, 2023
2	Penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi	8,7%	Kajian Ekonomi Regional – Bank Indonesia, 2023

**Wardhani Indah Sari, Aditya Fariski, Imam Syahroji Az-zahri, M.Aziiz Sukani, Warsani Purnama Sari & Ahmad Prayudi, Pemanfaatan Sistem E-Budgeting dalam Mitigasi Dampak Inflasi Pada APBD (Pemerintah Kota Medan)**

3	Under-spending anggaran infrastruktur	15%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, 2023
4	Peningkatan fleksibilitas anggaran dengan e-Budgeting	Hingga 25%	Indonesian Budget Center, 2021
5	Waktu revisi APBD	Dari 3 bulan menjadi 2 minggu	Susanto, A., dkk. (2022). Studi di 15 kota di Indonesia
6	Aparatur belum terampil dalam e-Budgeting	42%	Siregar, H., & Fahmi, R. (2023)
7	Integrasi sistem e-Budgeting dengan SIPD	Lemah (kategori kualitatif)	Siregar, H., & Fahmi, R. (2023)
8	Ketersediaan fitur prediktif inflasi	Belum optimal	Siregar, H., & Fahmi, R. (2023)

Data pada Tabel 1 menunjukkan keterkaitan antara dinamika inflasi, daya beli masyarakat, serta efektivitas implementasi e-Budgeting di Kota Medan. Dari sisi makroekonomi, inflasi Kota Medan tahun 2023 tercatat sebesar 5,2% (BPS Kota Medan, 2023). Angka ini relatif lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, sehingga berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat sebesar 8,7% (Bank Indonesia, 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa inflasi tidak hanya menekan konsumsi rumah tangga, tetapi juga mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui turunnya potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dampak inflasi terhadap kinerja APBD juga tercermin dalam tingginya angka under-spending pada anggaran infrastruktur, yakni mencapai 15% (Dinas PU Kota Medan, 2023). Under-spending ini menunjukkan adanya rigiditas fiskal yang membuat pemerintah kota kurang responsif dalam menyesuaikan alokasi belanja ketika terjadi tekanan harga. Dalam konteks ini, sistem e-Budgeting diharapkan dapat menjadi instrumen mitigasi dengan meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi perencanaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan e-Budgeting berpotensi meningkatkan fleksibilitas anggaran hingga 25% (Indonesian Budget Center, 2021). Selain itu, penggunaan sistem digital terbukti mempercepat proses birokrasi, di mana waktu revisi APBD dapat dipangkas signifikan, dari 3 bulan menjadi hanya 2 minggu (Susanto et al., 2022). Percepatan ini menjadi indikator penting dalam mendukung responsivitas fiskal terhadap guncangan ekonomi, sejalan dengan teori digital fiscal resilience yang menekankan peran teknologi dalam memperkuat adaptasi kebijakan fiskal (Davoodi, 2022).

Namun, kendala implementasi e-Budgeting di Medan masih cukup signifikan. Sekitar 42% aparatur belum terampil dalam mengoperasikan sistem digital ini (Siregar & Fahmi, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penghambat optimalisasi. Selain itu, integrasi antara e-Budgeting dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) masih tergolong lemah. Akibatnya, sinkronisasi data antara perencanaan dan penganggaran tidak berjalan maksimal, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penyusunan kebijakan fiskal.

Keterbatasan lain yang teridentifikasi adalah belum optimalnya fitur prediktif inflasi dalam e-Budgeting (Siregar & Fahmi, 2023). Padahal, fitur ini memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah daerah melakukan antisipasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Ketiadaan sistem prediksi yang akurat membuat pemerintah cenderung reaktif dibanding proaktif dalam merespons tekanan inflasi, yang pada akhirnya dapat memperlambat efektivitas mitigasi fiskal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa e-Budgeting di Kota Medan memiliki potensi signifikan sebagai instrumen mitigasi inflasi, khususnya dalam meningkatkan efisiensi perencanaan anggaran, akurasi alokasi dana, dan transparansi pengelolaan keuangan. Akan tetapi, efektivitasnya masih terbatas oleh kendala teknis dan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, penguatan integrasi sistem dengan SIPD serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi rekomendasi utama agar e-Budgeting dapat berfungsi optimal sebagai shock absorber fiskal. Temuan ini sejalan dengan kajian Moon (2021) yang menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan digital (digital gap) dalam penerapan e-government di negara berkembang.

## SIMPULAN



Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem e-Budgeting memiliki peran strategis sebagai instrumen mitigasi dampak inflasi terhadap APBD Kota Medan, terutama melalui peningkatan efisiensi, fleksibilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran. Penerapan e-Budgeting terbukti mampu memangkas waktu revisi APBD dari tiga bulan menjadi dua minggu, serta meningkatkan fleksibilitas alokasi anggaran hingga 25%. Hal ini memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam merespons cepat guncangan inflasi dan menjaga keberlanjutan fiskal.

Namun, efektivitas e-Budgeting masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Pertama, kapasitas aparatur yang belum merata, di mana sekitar 42% pegawai belum terampil mengoperasikan sistem digital, sehingga menghambat pemanfaatan fitur analitik secara optimal. Kedua, integrasi e-Budgeting dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih lemah, menimbulkan tumpang tindih data dan keterlambatan sinkronisasi. Ketiga, fitur prediktif inflasi dalam sistem masih belum optimal, sehingga pemerintah daerah cenderung reaktif ketimbang proaktif dalam mengantisipasi dampak inflasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Nugroho, D. (2022). *Dampak faktor makroekonomi terhadap kapasitas fiskal daerah*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(2), 145–160.
- Antara. (2024, August 5). P-APBD 2024 berkurang Rp868,2 miliar, legislator minta infrastruktur tetap diprioritaskan. <https://sumut.antaranews.com/berita/581831/p-apbd-2024-berkurang-rp8682-miliar-legislator-minta-infrastruktur-tetap-diprioritaskan> Antara News Sumut
- Antara. (2025, January 10). Pemkot Medan: APBD 2024 dikelola secara sehat dan optimal. <https://sumut.antaranews.com/berita/607954/pemkot-medan-apbd-2024-dikelola-secara-sehat-dan-optimal> Antara News Sumut
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. (2023). *Statistik ekonomi Kota Medan 2023*. Medan: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. (2025a, January 2). Desember 2024, inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Medan sebesar 2,12 persen (Berita Resmi Statistik). <https://medankota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/02/180/...> Medan Kota
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. (2025, July 1). Juni 2025, inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,25 persen (Berita Resmi Statistik). <https://sumut.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/01/1348/...> BPS Sumatera Utara
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Inflasi Kota Medan tahun 2023*. Badan Pusat Statistik Kota Medan.
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara: Triwulan IV 2023*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV 2023*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). *Kajian ekonomi regional Provinsi Sumatera Utara 2023*. Medan: Kantor Perwakilan BI.
- Basri, M. C. (2021). *Kebijakan fiskal Indonesia dalam menghadapi dinamika global*. Jakarta: LP3ES.
- Caba, C. (2008). E-budgeting as an instrument of e-government: A comparative analysis. *Public Administration Review*, 68(3), 425–436. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00880.x>
- Davoodi, H. (2022). *Digital fiscal resilience: Building adaptive public finance in the digital era*. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(2), 145–162.
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. (2023). *Laporan realisasi anggaran infrastruktur 2023*. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. (2023). *Laporan realisasi pembangunan infrastruktur Kota Medan tahun anggaran 2023*. Pemerintah Kota Medan.
- Garcia-Macia, D. (2023). The effects of inflation on public finances (IMF Working Paper WP/23/93). International Monetary Fund. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2023/English/wpiea2023093-print-pdf.ashx> IMF
- Indonesian Budget Center. (2021). *Evaluasi implementasi e-Budgeting di Indonesia*. Indonesian Budget Center.
- Indonesian Budget Center. (2021). *Studi efektivitas implementasi e-Budgeting di Indonesia*. Jakarta: IBC.
- International Monetary Fund (IMF). (2023, April). Inflation and disinflation: What role for fiscal policy? *Fiscal Monitor*, Chapter 2. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2023/April/English/ch2.ashx> IMF



**Wardhani Indah Sari, Aditya Fariski, Imam Syahroji Az-zahri, M.Aziiz Sukani, Warsani Purnama Sari & Ahmad Prayudi**, Pemanfaatan Sistem E-Budgeting dalam Mitigasi Dampak Inflasi Pada APBD (Pemerintah Kota Medan)

- International Monetary Fund (IMF). (2025, April). Navigating trade-offs between price and financial stability (Staff Discussion Note). <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/SDN/2025/English/SDNEA2025003.ashx> IMF
- Kementerian Dalam Negeri RI—Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda). (2024, October 23). Kemendagri dorong pemda wajib gunakan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah. <https://keuda.kemendagri.go.id/...> Keuda
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. London: Macmillan.
- Moon, M. J. (2021). Evolution of digital government in developing countries: Progress and challenges. *Public Administration and Development*, 41(1), 3–15.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- OECD. (2022). OECD Economic Outlook, Volume 2022 Issue 2. Organisation for Economic Co-operation and Development. [https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook/volume-2022/issue-2\\_f6da2159-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook/volume-2022/issue-2_f6da2159-en.html) OECD
- Pemerintah Kota Medan. (2023). Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2024. <https://jdih.medan.go.id/...> JDIH Medan
- Pemerintah Kota Medan. (2023). *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2024*. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- SIPD RI—Kementerian Dalam Negeri. (t.t.). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI). <https://sipd.kemendagri.go.id/landing/> SIPD
- Siregar, H., & Fahmi, R. (2023). Implementasi e-Budgeting di Kota Medan: Tantangan dan prospek. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 211–227.
- Surabaya City Government. (2023). Tim SIPD Kemendagri pastikan e-Budgeting Pemkot Surabaya diadopsi nasional. <https://surabaya.go.id/...> Surabaya City Website
- Susanto, A., Prabowo, T., & Lestari, D. (2022). Digitalisasi APBD di Indonesia: Studi di 15 kota. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(3), 301–319.